

**ANALISIS PENGARUH INKLUSI KEUANGAN  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 14  
KABUPATEN/KOTA TERPILIH DI PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012-2016**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Proram Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

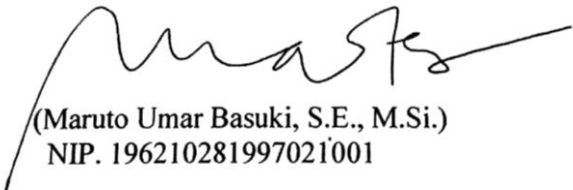
**SAMUEL PETRA NOVIANTO**  
**NIM. 12020114130080**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2018**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Samuel Petra Novianto  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020114130080  
Fakultas/Departemen : Ekonomika dan Bisnis/IESP  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH INKLUSI  
KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI 14 KABUPATEN/KOTA  
TERPILIH DI PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR TAHUN 2012-2016**  
Dosen Pembimbing : Maruto Umar Basuki, S.E., M.Si.

Semarang, 31 Agustus 2018  
Dosen Pembimbing,



(Maruto Umar Basuki, S.E., M.Si.)  
NIP. 196210281997021001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Samuel Petra Novianto

Nomor Induk Mahasiswa : 12020114130080

Fakultas/Departemen : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH INKLUSI**

**KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN**

**EKONOMI 14 KABUPATEN/KOTA**

**TERPILIH DI PROVINSI NUSA TENGGARA**

**TIMUR TAHUN 2012-2016**

Dosen Pembimbing : Maruto Umar Basuki, S.E., M.Si.

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 September 2018**

Tim Penguji

1. Maruto Umar Basuki, S.E., M.Si

2. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si

3. Firmansyah, S.E., M.Si., Ph.D

*(Handwritten signatures of the examiners)*



Mengetahui,  
Wakil Dekan I Akademik dan Kemahasiswaan

*(Handwritten signature of Anis Chariri)*  
**Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.**  
NIP. 19670809 199203 1001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Samuel Petra Novianto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini terdapat keseluruhan atau sebagian hasil tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau saya ambil tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah tulisan hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 31 Agustus 2018  
Yang membuat pernyataan,



(Samuel Petra Novianto)  
NIM. 12020114130080

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepada-mu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui”

Yeremia 33 : 3

*Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya. Terima kasih untuk doa, semangat, dan dukungannya yang selalu mengiringi saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*

## **ABSTRACT**

*Financial inclusion is currently a new strategy by the government to improve Indonesia's economy. This study aims to identify the conditions of financial inclusion and analyze the effect of financial inclusion on the economic growth of 14 selected regions/cities in East Nusa Tenggara Province in 2012-2016.*

*The method of analysis in this study uses descriptive statistical analysis and panel data regression. Descriptive statistical analysis was used to identify Index of Banking Penetration, Index of Banking Services Availability, and Index of Banking Services Usage of 14 selected regions/cities in East Nusa Tenggara Province in 2012-2016. Panel data regression analysis using the Fixed Effect Model method is used to analyze the effect of the Index of Banking Penetration, Index of Banking Services Availability, and Index of Banking Services Usage on economic growth. This study also includes a control variable, which is the population that works. The data used in this research is secondary data.*

*Descriptive statistical analysis results show that the overall Index of Banking Penetration, Index of Banking Services Availability, and Index of Banking Services Usage of 14 selected regions/cities in Nusa Tenggara Province 2012-2016 are subject to fluctuating and tend to be low. The panel data regression results show the Index of Banking Penetration, Index of Banking Services Availability, and Index of Banking Services Usage have a positive and significant effect, while the working population has a negative and insignificant effect on the economic growth of 14 selected regions/cities of East Nusa Tenggara Province in 2012-2016.*

**Keywords** : *financial inclusion, index of banking penetration, index of banking services availability, and index of banking services usage, economic growth*

## ABSTRAK

Inklusi keuangan saat ini menjadi strategi baru yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi inklusi keuangan dan menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012-2016.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi kondisi inklusi keuangan berdasarkan Indeks Penetrasi Perbankan, Indeks Ketersediaan Jasa Perbankan, dan Indeks Penggunaan Jasa Perbankan 14 kabupaten/kota terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012-2016. Analisis regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* digunakan untuk menganalisis pengaruh Indeks Penetrasi Perbankan, Indeks Ketersediaan Jasa Perbankan, dan Indeks Penggunaan Jasa Perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga menyertakan variabel kontrol, yaitu jumlah penduduk yang bekerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan secara keseluruhan Indeks Penetrasi Perbankan, Indeks Ketersediaan Jasa Perbankan, dan Indeks Penggunaan Jasa Perbankan 14 kabupaten/kota terpilih Provinsi Nusa Tenggara 2012-2016 mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung masing rendah. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa Indeks Penetrasi Perbankan, Indeks Ketersediaan Jasa Perbankan, dan Indeks Penggunaan Jasa Perbankan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan penduduk yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012-2016.

**Kata kunci** : inklusi keuangan, indeks penetrasi perbankan, indeks ketersediaan jasa perbankan, indeks penggunaan jasa perbankan, pertumbuhan ekonomi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 14 KABUPATEN/KOTA TERPILIH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012-2016”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Maruto Umar Basuki, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmu dan waktunya untuk memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si, Ph.D. selaku dosen wali dari penulis yang selalu memberikan doa, bimbingan, dan perhatian selama ini.
4. Seluruh dosen dan staff Departemen Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Seluruh staff BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan pelayanan dan waktunya dalam membalas email-email penulis sehingga data dalam skripsi ini lengkap dan dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Hariyanta dan Ibu Astri yang telah mendidik, membimbing, memberikan doa dan pengorbanan yang tak ternilai selama ini, kakak dan adik penulis Hana Suryani dan Trivena Maria C. yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat.
7. Novi Pusparini yang selalu memberikan waktu, dukungan, tenaga, dan menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis Septianus Angga, Jonathan Anugerah, Faly Santoso, Akhmad Sadewa, Maulana Eka, Adhevyo Reza, dan Rismanto Irawan yang selalu ada dalam keadaan suka dan duka, yang selalu memberikan motivasi dan doa bagi penulis didalam penyelesaian skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan sesama bimbingan, Tohyan Aziz, Henty Eka, Rachman Falito, dan Cendikia yang telah membantu, menjadi teman diskusi dan memberikan masukan selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman seperjuangan IESP 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tempat berbagi ilmu dan canda tawa selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Sukses untuk kita semua.
11. Seluruh anggota magang LPM Edents 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak pengalaman dan motivasi.
12. Teman-teman anggota KKN Desa Teluk Wetan, Fauzi, Ulan, Laily, Dhani, Anisa, dan Mba Kisningsih yang telah memberikan semangat dan doa.

13. Teman-teman kos Rusunawa Undip yang telah memberikan doa dan semangat.

14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis dalam menyusun skripsi ini mungkin masih memiliki kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

Semarang, 31 Agustus 2018  
Penulis,



(Samuel Petra Novianto)  
NIM. 12020114130080

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i       |
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....  | ii      |
| PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....                                   | iii     |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....                              | iv      |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....  | v       |
| <i>ABSTRACT</i> .....  | vi      |
| ABSTRAK .....  | vii     |
| KATA PENGANTAR .....   | viii    |
| DAFTAR TABEL.....  | xi      |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xiii    |
| DAFTAR LAMPIRAN.....   | xiv     |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 10      |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                            | 11      |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....                                      | 11      |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian .....                                    | 12      |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                     | 12      |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                                      | 14      |
| 2.1 Landasan Teori.....  | 14      |
| 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi .....                                    | 14      |
| 2.1.2 Sektor Keuangan.....   | 17      |
| 2.1.3 Inklusi Keuangan .....                                       | 21      |
| 2.1.4 Hubungan Variabel Tidak Terikat terhadap Variabel Terikat .. | 29      |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....                                     | 32      |
| 2.3 Kerangka Pemikiran .....                                       | 35      |
| 2.4 Hipotesis Penelitian.....                                      | 37      |

|  |    |
|--|----|
| BAB III METODE PENELITIAN .....  | 39 |
| 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....  | 39 |
| 3.1.1 Variabel Penelitian.....   | 39 |
| 3.1.2 Definisi Operasional Variabel .....  | 39 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data .....  | 41 |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data .....  | 42 |
| 3.4 Metode Analisis.....   | 42 |
| 3.4.1 Pengukuran Indeks Dimensi Inklusi Keuangan.....  | 42 |
| 3.4.2 Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi   | 44 |
| 3.4.3 Estimasi Model .....   | 47 |
| 3.4.4 Pemilihan Model (Uji Kesesuaian Model) .....   | 49 |
| 3.4.5 Deteksi Asumsi Klasik .....  | 51 |
| 3.4.6 Uji Statistik .....  | 54 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....  | 57 |
| 4.1 Gambaran Umum Wilayah.....   | 57 |
| 4.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif.....   | 57 |
| 4.1.2 Kondisi Perekonomian.....  | 59 |
| 4.1.3 Kondisi Demografi .....  | 60 |
| 4.1.4 Kondisi Perbankan.....   | 64 |
| 4.2 Analisis Data dan Pembahasan .....   | 70 |
| 4.2.1 Pengukuran Indeks Dimensi Inklusi Keuangan.....  | 70 |
| 4.2.2 Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi   | 80 |
| 4.3 Interpretasi Hasil .....   | 87 |
| 4.3.1 Analisis Pengaruh Indeks Penetrasi Perbankan Terhadap<br>Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi<br>Nusa Tenggara Timur .....         | 88 |
| 4.3.2 Analisis Pengaruh Indeks Ketersediaan Jasa Perbankan Terhadap<br>Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi<br>Nusa Tenggara Timur ..... | 90 |
| 4.3.3 Analisis Pengaruh Indeks Penggunaan Jasa Perbankan Terhadap<br>Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi<br>Nusa Tenggara Timur .....   | 91 |
| 4.3.4 Analisis Pengaruh Penduduk Bekerja Terhadap Pertumbuhan<br>Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara<br>Timur .....                   | 92 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| BAB V PENUTUP .....    | 94  |
| 5.1 Kesimpulan.....    | 94  |
| 5.2 Keterbatasan ..... | 95  |
| 5.3 Saran.....         | 95  |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 97  |
| LAMPIRAN.....          | 101 |

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Indikator Utama Inklusi Keuangan Beberapa Negara ASEAN Tahun 2014.....  | 4       |
| Tabel 1.2 PDRB per Kapita 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016 (Ribu Rupiah).....   | 6       |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....  | 32      |
| Tabel 4.1 PDRB ADHK 2010 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 - 2016 (Miliar Rupiah).....            | 59      |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Usia Kerja 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 – 2016 (Orang).....        | 61      |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Bekerja 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016 .....                    | 63      |
| Tabel 4.4 Jumlah Rekening Simpanan Bank 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016 (Rekening).....    | 64      |
| Tabel 4.5 Jumlah Kantor Bank 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016 (Unit) .....                  | 66      |
| Tabel 4.6 Jumlah DPK Perbankan 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016 (Miliar Rupiah).....        | 67      |
| Tabel 4.7 Jumlah Kredit Perbankan 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016 (Miliar Rupiah).....     | 69      |
| Tabel 4.8 Indikator Indeks Penetrasi Perbankan 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016.....        | 71      |
| Tabel 4.9 Indikator Indeks Ketersediaan Perbankan 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016.....     | 72      |
| Tabel 4.10 Indikator Indeks Penggunaan Jasa Perbankan 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016..... | 74      |
| Tabel 4.11 Bobot, Batas Maksimum dan Minimum Indeks Setiap Dimensi Inklusi Keuangan.....  | 75      |
| Tabel 4.12 Indeks Penetrasi Perbankan 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016.....                 | 76      |

|   |    |
|---|----|
| Tabel 4.13 Indeks Ketersediaan Jasa Perbankan 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016..... | 78 |
| Tabel 4.14 Indeks Penggunaan Jasa Perbankan 14 Kabupaten/Kota Terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016.....   | 79 |
| Tabel 4.15 Hasil Uji <i>Chow</i> .....  | 80 |
| Tabel 4.16 Hasil Uji <i>Hausman</i> .....   | 81 |
| Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinearitas.....   | 83 |
| Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....  | 83 |
| Tabel 4.19 Hasil Uji-t.....   | 85 |
| Tabel 4.20 Hasil Uji-F.....   | 86 |
| Tabel 4.21 Hasil Uji- $R^2$ .....   | 86 |
| Tabel 4.22 Hasil Estimasi Regresi Data Panel ( <i>Fixed Effect Model</i> ) .....  | 87 |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan, Kredit Perbankan, dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016 (Miliar Rupiah)..... | (8)     |
| Gambar 2.1 Enam Pilar Strategi Keuangan Nasional Inklusif.....   | 25      |
| Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....   | 37      |
| Gambar 4.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur .....   | 58      |
| Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....   | 82      |
| Gambar 4.3 Hasil Uji Autokorelasi.....   | 84      |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran A Data Variabel Penelitian .....                           | 102     |
| Lampiran B Data Variabel dalam Logaritma Natural (ln) .....         | 105     |
| Lampiran C Hasil Uji <i>Chow</i> .....                              | 108     |
| Lampiran D Hasil Uji <i>Hausman</i> .....                           | 109     |
| Lampiran E Hasil Uji Normalitas .....                               | 110     |
| Lampiran F Hasil Uji Multikolinearitas .....                        | 110     |
| Lampiran G Hasil Uji Heterokedastisitas .....                       | 111     |
| Lampiran H Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> ..... | 112     |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan ekonomi dapat dikatakan semakin baik. Oleh karena hal tersebut setiap negara berusaha untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Terjadinya pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang didukung oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Salah satu sektor yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah sektor keuangan. Menurut Levine (2005), terdapat empat peran sektor keuangan yang bermanfaat bagi perekonomian, yaitu mampu menurunkan resiko, memobilisasi tabungan, menurunkan biaya transaksi dan informasi, dan mendorong terjadinya spesialisasi. Melalui peran tersebut sektor keuangan mampu menciptakan akumulasi modal dan inovasi teknologi yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Fabya (2011) menyatakan bahwa sektor keuangan mampu menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal tersebut kemudian mampu menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Peran sektor keuangan yang begitu baik bagi perekonomian pada kenyataannya belum dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. World Bank mencatat pada tahun 2016 terdapat 1,7 miliar penduduk usia kerja yang masih *unbanked* atau belum terjangkau dengan sektor keuangan formal. Mereka umumnya berada dikelompok masyarakat kelas bawah dan bekerja di sektor yang informal. Tanpa akses ke layanan keuangan formal akhirnya mereka harus mengandalkan cara pengelolaan uang secara informal, seperti meminjam uang kepada kerabat, pialang uang, rentenir, atau menyimpannya di rumah. Terkadang pilihan tersebut tidak mencukupi, berisiko, mahal, dan tidak dapat diprediksi. Menurut DFID (2004) tidak adanya akses terhadap sektor keuangan dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berpartisipasi penuh di pasar keuangan, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Guna mengatasi rendahnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal, saat ini inklusi keuangan telah menjadi fokus kebijakan yang dilakukan banyak negara termasuk Indonesia. Inklusi keuangan merupakan kemampuan individu atau kelompok dapat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan formal yang bermanfaat dan terjangkau, serta mampu memenuhi kebutuhan mereka, seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (World Bank, 2014). Menurut Julie (2016) inklusi keuangan adalah strategi intervensi yang berusaha mengatasi friksi pasar yang menghambat pasar keuangan untuk beroperasi pada orang miskin atau tidak mampu. Intervensi ini bertujuan untuk menarik populasi yang *unbanked* ke dalam sistem keuangan formal, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk

mengakses layanan keuangan formal mulai dari tabungan, pembayaran, dan transfer ke kredit dan asuransi.

Sarma (2012) menyatakan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kondisi inklusi keuangan disuatu wilayah, yaitu dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, penggunaan jasa perbankan. Indikator perbankan digunakan untuk melihat kondisi inklusi keuangan suatu wilayah dikarenakan sub sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki peran paling besar di dalam sektor keuangan formal dibandingkan dengan sub sektor lainnya.

Dimensi penetrasi perbankan (*accessibility*) menunjukkan sejauh mana masyarakat pada suatu wilayah telah mengakses jasa perbankan. Kepemilikan akun bank menjadi indikator yang menggambarkan masyarakat telah mengakses jasa perbankan. Kedua, dimensi ketersediaan jasa perbankan (*availability*) berkaitan dengan infrastruktur layanan perbankan yang tersedia bagi masyarakat. Untuk melihat dimensi ketersediaan jasa perbankan indikator yang digunakan adalah jumlah kantor bank atau ATM (*Automatic Teller Machine*) yang tersedia pada suatu wilayah. Sedangkan, dimensi penggunaan jasa perbankan (*usage*) berfungsi untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memanfaatkan layanan jasa perbankan. Indikator yang digunakan dalam dimensi penggunaan layanan keuangan adalah jumlah tabungan dan kredit perbankan pada suatu wilayah.

Pada tahun 2015, World Bank merilis kondisi indikator-indikator utama inklusi keuangan diberbagai negara termasuk Indonesia. Indikator yang digunakan adalah rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki akun bank, rasio

penduduk usia 15 tahun ke atas yang menabung di lembaga keuangan formal, serta rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang meminjam di lembaga keuangan formal.

**Tabel 1.1**  
**Indikator Utama Inklusi Keuangan Beberapa Negara ASEAN Tahun 2014**

| No. | Indikator | Kepemilikan<br>Akun<br>(% age 15+) | <i>Formal</i><br><i>Savings</i><br>(% age 15+) | <i>Formal</i><br><i>Borrowing</i><br>(% age 15+) |
|-----|-----------|------------------------------------|--|--|
| 1   | Indonesia | 36                                 | 27   | 13   |
| 2   | Malaysia  | 81                                 | 34   | 20   |
| 3   | Singapura | 96                                 | 46   | 14   |
| 4   | Thailand  | 78                                 | 41   | 18   |
| 5   | Filipina  | 31                                 | 15   | 12   |

Sumber: World Bank, 2015

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa indikator utama inklusi keuangan Indonesia ditahun 2014 masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bila dilihat penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia yang telah memiliki akun bank hanya sebesar 37 %. Selain itu, dari segi penggunaan layanan perbankan juga masih rendah, tingkat penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyimpan dana di bank hanya 27 %, bahkan dari sisi kredit perbankan lebih rendah hanya sebesar 13 %. Hal tersebut menunjukkan masih banyak penduduk usia 15 tahun ke atas atau usia kerja di Indonesia yang belum terjangkau dan menggunakan layanan jasa keuangan perbankan.

Menurut Bank Indonesia (2014), terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya inklusi keuangan di Indonesia, yaitu dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, terdapat *asymetric information* yang mengakibatkan institusi keuangan terlalu selektif memilih nasabah dan tingginya

biaya operasional di daerah-daerah terpencil. Selain itu, terdapat persepsi dari lembaga keuangan bahwa pelayanan untuk rumah tangga berpendapatan rendah tidak menguntungkan, serta terbatasnya pengetahuan mengenai kebutuhan rumah tangga berpendapatan rendah yang menyebabkan desain produk tidak sesuai dengan kebutuhan. Adapun dari sisi permintaan, faktornya adalah pendapatan rumah tangga terlalu rendah, persyaratan administrasi terlalu rumit, lokasi kantor tidak terjangkau, kepercayaan terhadap lembaga keuangan rendah, persepsi bahwa bank hanya untuk orang kaya, dan faktor sosiokultural, misalnya larangan agama.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2016 rasio jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 22,19 %. Masih tingginya kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disebabkan karena sikap masyarakat yang kurang produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya lapangan pekerjaan yang kurang didukung dengan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi yang kurang baik.

Selain itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki PDRB per kapita yang terbilang sangat rendah. Seperti diketahui PDRB per kapita merupakan ukuran yang menunjukkan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat PDRB per kapita suatu wilayah, maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakatnya begitu juga sebaliknya. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat perbandingan PDRB per Kapita 34 Provinsi di Indonesia selama tahun 2012-2016.

**Tabel 1.2**  
**PDRB per Kapita 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016 (Ribuan Rupiah)**

| No. | Provinsi                   | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             |
|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | Aceh                       | 23.099,13        | 23.228,59        | 23.129,04        | 22.524,31        | 22.837,27        |
| 2   | Sumatera Utara             | 28.036,88        | 29.339,21        | 30.477,07        | 31.637,41        | 32.885,09        |
| 3   | Sumatera Barat             | 23.744,01        | 24.857,64        | 25.982,83        | 27.080,76        | 28.164,93        |
| 4   | Riau                       | 72.396,34        | 72.297,05        | 72.390,88        | 70.769,78        | 70.604,43        |
| 5   | Jambi                      | 32.417,72        | 34.012,10        | 35.878,09        | 36.753,52        | 37.728,80        |
| 6   | Sumatera Selatan           | 28.577,89        | 29.656,76        | 30.636,27        | 31.549,30        | 32.699,05        |
| 7   | Bengkulu                   | 18.143,51        | 18.919,30        | 19.626,72        | 20.302,48        | 21.041,59        |
| 8   | Lampung                    | 21.794,83        | 22.770,68        | 23.647,27        | 24.581,78        | 25.571,04        |
| 9   | Kep. Bangka Belitung       | 31.172,42        | 32.081,30        | 32.859,64        | 33.480,38        | 34.134,61        |
| 10  | Kep. Riau                  | 70.930,00        | 73.743,33        | 76.313,81        | 78.625,43        | 80.330,54        |
| 11  | DKI Jakarta                | 123.962,38       | 130.060,31       | 136.312,34       | 142.913,61       | 149.847,63       |
| 12  | Jawa Barat                 | 23.036,00        | 24.118,31        | 24.966,86        | 25.845,50        | 26.921,57        |
| 13  | Jawa Tengah                | 20.950,62        | 21.844,87        | 22.819,16        | 23.887,06        | 24.965,78        |
| 14  | DI Yogyakarta              | 20.183,88        | 21.037,70        | 21.867,90        | 22.688,36        | 23.566,32        |
| 15  | Jawa Timur                 | 29.508,40        | 31.092,04        | 32.703,39        | 34.271,81        | 35.970,71        |
| 16  | Banten                     | 27.716,47        | 28.910,66        | 29.846,64        | 30.813,03        | 31.780,68        |
| 17  | Bali                       | 26.689,58        | 28.129,67        | 29.668,90        | 31.093,61        | 32.686,68        |
| 18  | Nusa Tenggara Barat        | 14.276,69        | 14.809,84        | 15.369,94        | 18.475,14        | 19.308,54        |
| 19  | <b>Nusa Tenggara Timur</b> | <b>10.030,98</b> | <b>10.396,76</b> | <b>10.742,32</b> | <b>11.087,91</b> | <b>11.474,04</b> |
| 20  | Kalimantan Barat           | 21.062,22        | 21.971,93        | 22.712,65        | 23.456,52        | 24.310,94        |
| 21  | Kalimantan Tengah          | 27.749,01        | 29.106,40        | 30.216,73        | 31.619,18        | 32.903,20        |
| 22  | Kalimantan Selatan         | 25.547,77        | 26.423,90        | 27.220,27        | 27.786,68        | 28.538,56        |
| 23  | Kalimantan Timur           | 124.501,88       | 133.868,68       | 133.086,11       | 128.603,13       | 125.409,43       |
| 24  | Kalimantan Utara           | -                | 74.106,93        | 77.152,60        | 76.823,46        | 76.785,54        |
| 25  | Sulawesi Utara             | 25.145,96        | 26.445,86        | 27.805,52        | 29.196,47        | 30.682,60        |
| 26  | Sulawesi Tengah            | 22.724,47        | 24.490,98        | 25.316,27        | 28.778,64        | 31.164,25        |
| 27  | Sulawesi Selatan           | 24.507,17        | 26.083,42        | 27.749,47        | 29.435,92        | 31.305,06        |
| 28  | Sulawesi Tenggara          | 25.489,79        | 26.815,36        | 27.896,05        | 29.202,70        | 30.477,19        |
| 29  | Gorontalo                  | 16.650,27        | 17.639,12        | 18.622,44        | 19.474,13        | 20.427,82        |
| 30  | Sulawesi Barat             | 17.169,06        | 18.008,81        | 19.232,05        | 20.250,51        | 21.067,91        |
| 31  | Maluku                     | 13.129,11        | 13.572,07        | 14.219,62        | 14.740,38        | 15.321,09        |
| 32  | Maluku Utara               | 15.691,01        | 16.332,22        | 16.869,52        | 17.533,78        | 18.177,30        |
| 33  | Papua Barat                | 55.047,84        | 57.581,36        | 59.142,59        | 60.064,13        | 61.242,01        |
| 34  | Papua                      | 36.280,03        | 38.621,36        | 39.271,88        | 41.376,97        | 44.340,94        |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2012-2016 mengalami peningkatan yang positif setiap

tahunnya. Namun, jika dibandingkan dengan wilayah lain, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki PDRB per kapita yang terendah dari semua provinsi di Indonesia selama tahun 2012-2016. Pada tahun 2016 PDRB per kapita di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya sebesar Rp 11.474.040,00 sangat jauh berbeda dengan PDRB per kapita yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 149.874.630,00. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

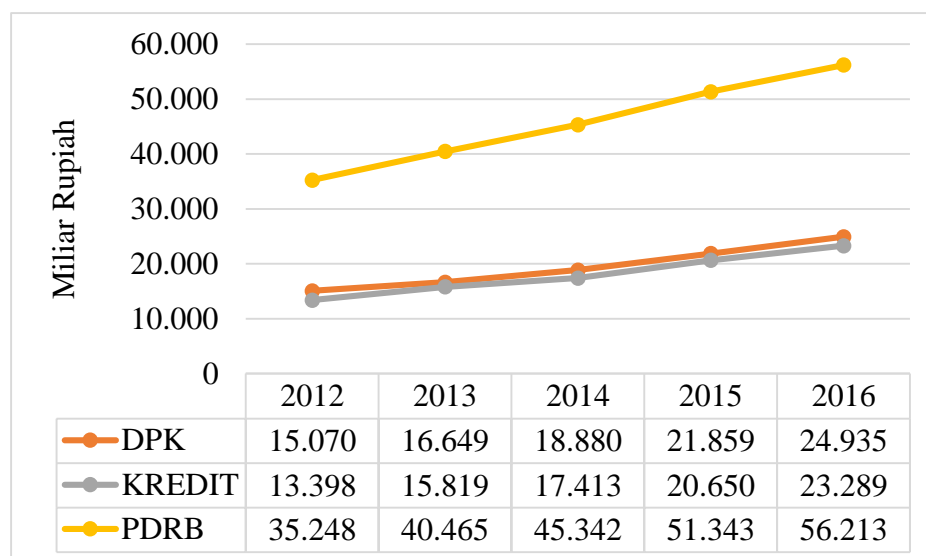
Kondisi masyarakat yang masih miskin dan berpendapatan rendah secara umum berdampak pada minimnya akses terhadap lembaga jasa perbankan. Purba (2016) menyatakan bahwa kendala masyarakat miskin adalah pendapatan yang rendah dan hanya mampu memenuhi kebutuhan standar, sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki tabungan. Hal ini akhirnya berdampak pada kurangnya akses masyarakat miskin ke instrumen keuangan. Berdasarkan data *Survey on Financial Inclusion and Access* (SOFIA) tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya terdapat 49 % penduduk 15 tahun ke atas di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengakses jasa keuangan pada bank, 31 % pada jasa keuangan formal selain bank, 3 % pada jasa keuangan semiformal, 4 % pada jasa keuangan informal, dan 13 % masih *unbanked*. Dari 49 % yang telah mengakses layanan jasa keuangan pada bank, hanya terdapat 31 % masyarakat yang telah memiliki rekening bank. Data tersebut menunjukkan masih banyak penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum terakses dengan jasa perbankan.

Selain itu, masih banyaknya jumlah wilayah yang tertinggal membuat pembangunan antar daerah tidak merata termasuk juga pada infrastruktur perbankan

yang tersedia. Ketua OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winter Marbun, menyatakan pembangunan kantor bank di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terpusat di ibu kota, yaitu Kota Kupang sehingga belum menjangkau ke wilayah-wilayah pelosok. Hal ini mengakibatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa perbankan menjadi rendah.

Rendahnya masyarakat yang mengakses jasa perbankan dan belum meratanya jumlah kantor bank yang tersedia juga diikuti dengan rendahnya dana masyarakat yang terhimpun dan kredit yang disalurkan oleh bank. Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit perbankan dibandingkan dengan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012-2016.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan, Kredit Perbankan, dan PDRB**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun**  
**2012-2016 (Miliar Rupiah)**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan DPK dan kredit perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012-2016 mengalami peningkatan yang

positif setiap tahunnya begitu juga dengan PDRB. Namun, jika dibandingkan antara DPK dan kredit perbankan dengan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat *gap* yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 rasio DPK terhadap PDRB hanya sebesar 44 % dan rasio kredit perbankan terhadap PDRB sebesar 41 %. Rendahnya rasio tersebut menunjukkan masih rendahnya pemanfaatan masyarakat terhadap jasa perbankan. Namun disatu sisi hal ini juga menunjukkan masih terdapat peluang yang besar untuk memobilisasi tabungan masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke sektor produktif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan kondisi inklusi keuangan diseluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2014 Bank Indonesia bersama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2NK) dan Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan membentuk Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai pedoman kebijakan inklusi keuangan di Indonesia. Pemerintah menargetkan pada tahun 2019 jumlah penduduk yang terakses dengan jasa keuangan formal mencapai angka 75 % dan ditahun 2020 sebesar 90 %. Pemerintah berharap dengan tercapainya akses layanan keuangan yang merata bagi semua masyarakat dapat meningkatkan perekonomian dan mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Beberapa studi empiris telah menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian Sharma (2016) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di India. Dai-

Won Kim dkk (2018) juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara *OIC Countries*. Selain itu, Iqbal dan Sami (2017) juga menemukan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

Sedangkan, penelitian di Indonesia yang membahas terkait hubungan inklusi keuangan dengan pertumbuhan ekonomi adalah Sanjaya (2016) yang mengkaji hubungan Indeks Inklusi Keuangan terhadap Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di 33 provinsi di Indonesia. Penelitiannya menyimpulkan terdapat korelasi positif antara inklusi keuangan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Menurutnya perlu adanya kebijakan di Indonesia yang mendorong sektor keuangan untuk memperluas cakupan jasanya di luar dari target pasar yang ada saat ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki kondisi inklusi keuangan terbelang masih rendah. Hampir setengah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memiliki akses terhadap jasa perbankan. Ketersediaan jumlah kantor bank juga belum merata disetiap wilayah. Selain itu, dari segi penggunaan jasa perbankan juga masih rendah dilihat dari rendahnya rasio jumlah tabungan dan kredit perbankan terhadap PDRB selama tahun 2012-2016.

Rendahnya kondisi inklusi keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Melihat masih terbatasnya penelitian di Indonesia yang mengkaji tentang inklusi keuangan pada tingkat kabupaten/kota, maka wilayah penelitian yang dipilih adalah pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian, menyesuaikan dengan data yang tersedia pada sumber penelitian, maka jumlah kabupaten/kota yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 14 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi inklusi keuangan 14 kabupaten/kota terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana pengaruh penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jasa perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kondisi inklusi keuangan 14 kabupaten/kota terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Menganalisis pengaruh penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jasa perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun aspek yang berhubungan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan dan Bab V Kesimpulan.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah terkait inklusi keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan landasan teori yang menjadi dasar teoritis penelitian ini meliputi teori pertumbuhan Solow-Swan, teori sektor keuangan, teori inklusi keuangan. Pada bab ini juga dibahas terkait hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tentang inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis tentang inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pembahasan mengenai hasil analisis tentang inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **BAB V : PENUTUP**

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta mencakup saran yang direkomendasikan sesuai hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tentang inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota terpilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur.